

**ANALISIS PERENCANAAN ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2018**

Wilis Auliana*, Moh. Amin, Siti Aminah Anwar*****

Wilisauliaa@gmail.com

Universitas Islam Malang

ABSTRACT

The Purpose of This Research The purpose of this study was to analyze the performance of the Malang Regency Government Revenue and Expenditure Budget in 2016-2018 in financial terms and measured from the Budget Realization Report. This type of research used in this research is descriptive type of research. Descriptive research is research about a particular phenomenon or population that researchers obtain on the subject which is conducted to find out the independent variables, either one or more independent variables without making comparisons or connecting with other variables. The analytical method used in this study uses descriptive analysis based on the Budget Financial Report (LRA), namely the concept of the budget, especially the analysis of budget planning and budget realization. Data obtained directly from the BAKD Office. The results of this study Malang Regency Government said to be good in carrying out financial performance, but only a few evaluations that must be improved in managing decentralization, PAD, and income differences. The performance of the Malang Regency Government's APBD in allocating its Shopping Budget is said to be efficient, not indicated budget waste. Realization of Malang Regency Government Budget for 3 years running effectively by presenting the Budget Realization Report (LRA) in accordance with applicable procedures.

Keywords: *Budget Planning, Budget Realization, APBD Performance*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Setiap negara di seluruh dunia pasti memiliki perencanaan anggaran untuk tata kelola negara yang di realisasikan dalam bentuk pelayanan publik fungsinya menciptakan rasa nyaman kepada masyarakat. Pengelolaan, perencanaan yang baik akan menghasilkan laporan yang akurat dan tidak menimbulkan rasa kecurigaan. Pemerintah yang menjalankan dinasti pemerintahan, pelayanan masyarakat, serta perkembangan atau pembangunan daerah diharuskan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan laporan keuangannya agar tercipta pemerintahan yang bebas korupsi maupun penyelewengan dana.

Upaya konkrit salah satunya adalah yang dilakukan pemerintah dengan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun berdasarkan peraturan pemerintah melalui PP No 71 tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Standar ini di jadikan acuan pemerintah pusat maupun daerah untuk menghasilkan laporan yang akurat. Laporan yang dibuat pemerintah seharusnya meliputi Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi anggaran, dan catatan atas Laporan Keuangan.

Pemerintah menciptakan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pedoman pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah menjadi landasan hukum APBD/APBN. Instansi pemerintah membutuhkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk merealisasikan anggaran (Novita, 2014).

Menurut Lewis dan Oesterman (2009) salah satu rendahnya penyerapan karena kurang waspada pemerintah daerah dalam mengestimasi pendapatan dan pengeluaran keuangan yang tinggi. Pemerintah Daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jumlah nominal yang besar untuk meningkatkan penerimaan, mengurangi defisit anggaran, serta mengurangi penerimaan dana bersumber dari dana perimbangan dengan tujuan memajukan kemandirian daerah. Penerimaan dana oleh pemerintah pusat masih sangat tinggi, dalam hal ini membuktikan bahwa masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah Daerah bebas berinisiatif untuk mengembangkan daerahnya masing-masing, dengan syarat tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari otonomi daerah harus dikaitkan dengan pemerintah dan kepentingan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum yang lebih baik. Pelayanan kepada masyarakat baik berupa pengungkapan informasi pemerintahan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah.

Perkembangan teknologi saat ini sangat membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Pertukaran informasi melalui teknologi digital lebih mudah dan murah di bandingkan dengan proses manual. Teknologi informasi meliputi penggunaan teknologi seperti *web*, *internet*, dan *e-government*. Masih banyak

bentuk teknologi yang lain yang bisa menunjang kemajuan entitas ekonomi agar lebih mudah. Pemerintah Daerah di Indonesia hampir semuanya memiliki halaman *website* masing-masing dengan kelengkapan dan kualitas yang berbeda beda. Setiap *website* tersebut selalu memaparkan informasi umum tentang daerah tersebut. Mengenai informasi laporan keuangan daerah, tidak semua *website* pemerintah daerah menyediakan informasi laporan keuangan. Seiring berjalanya waktu pemerintah Kab. Malang satu persatu terungkap atas dugaan kasus penyelewengan dana di Kab. Malang. Mulai dari DPRD Kota Malang hingga Bupati Malang di periksa oleh KPK.

Dari pemaparan diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa faktor yang berpengaruh atas akuntabilitas laporan keuangan di sektor pemerintah daerah, menganalisis tentang perencanaan anggaran dan realisasi dana dalam beberapa periode kebelakang. Berdasarkan permasalahan dan fenomena yang terjadi diatas maka peneliti memilih judul **“ANALISIS PERENCANAAN ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2018”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, inti dari permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat di rumuskan “Bagaimana kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2018?”

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu: Untuk mengetahui serta menganalisis anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah kabupaten Malang.

Kontribusi Penelitian

Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan antara selisih perencanaan anggaran dan realisasi anggaran apakah sesuai dengan yang di rencanakan. Selain itu masyarakat di harapkan tidak tabu lagi membaca Laporan Keuangan Kabupaten Malang, serta menjadikan masyarakat lebih kritis lagi terhadap penyelewengan anggaran dana oleh pihak pihak curang dan dapat membandingkan antara perencanaan dan realisasi besar selisihnya.

Praktis

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat menyumbang ide bagi pemerintah kabupaten malang dalam mengambil kebijakan dalam hal meningkatkan laporan keuangan yang akurat. Perencanaan anggaran di buat sesuai kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menunjang fasilitas di Kabupaten Malang, sehingga realisasi anggaran tepat dapat terhindar dari penyelewengan atau kecurangan yang dilakukan oleh oknum tertentu, dan tidak menimbulkan asumsi negatif dari

masyarakat yang merugikan lembaga instansi tersebut. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi suatu evaluasi laporan keuangan pemerintah kabupaten Malang.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik bisa di definisikan sebagai kegiatan jasa yang didalamnya meliputi mengklasifikasikan, pencatatan, melaporkan kegiatan ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan sebuah informasi keuangan yang perlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai mengambil keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga tinggi negara dan departemen dibawahnya (Sujarweni 2015:1).

Akuntansi Sektor Publik bisa disebut manajemen keuangan publik. Cakupan dari elemen manajemen publik seperti perencanaan makroekonomi, realisasi anggaran, mobilisasi pendapatan dan audit sudah dipaparkan menurut pandangan akuntansi. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik adalah salah satu komponen dari manajemen publik. Perubahan tata kelola pemerintahan dan organisasi sektor pemerintahan adalah bagian dari akuntansi sektor publik. Kewajiban reformasi menimbulkan demokrasi dalam pengelolaan organisasi melalui aspek akuntabilitas dan transparansi. Ini bukan cuma di Indonesia, namun juga di negara lain, kewajiban ini lebih di hubungkan dengan bidang pengelolaan keuangan. Elemen akuntansi sektor publik Merupakan sebagai struktur yang diperlukan dalam mengelola manajemen keuangan publik perlu di pahami. Berikut adalah elemen-elemen Akuntansi sektor publik:

1. Perencanaan Publik
2. Penganggaran Dana Publik
3. Realisasi Anggaran Publik
4. Pengadaan Barang dan Jasa Publik
5. Pelaporan Keuangan Sektor Publik
6. Audit Sektor Publik
7. Pertanggungjawaban Publik

Perencanaan Anggaran

Perencanaan atau bisa disebut dengan *Planning* dapat diartikan sebagai aktivitas yang tersusun untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu dan dalam kurun waktu yang ditentukan. Hal ini ada beberapa kegiatan untuk menguji beberapa arah pencapaian, menghitung kapasitas, menentukan tujuan pencapaian, menentukan arah pencapaian. Pengertian perencanaan ialah suatu kegiatan penentuan tujuan organisasi dan memaparkan dengan jelas strategi-strategi, operasi dan taktik yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh (Early Suandy, 2001:2).

Anggaran ialah suatu perencanaan yang tersusun secara rinci berbentuk nominal serta dinyatakan dalam unit moneter mencakup semua aktivitas perusahaan dalam jangka waktu atau tahun tertentu dimasa yang datang. Maka dari itu, anggaran dapat juga di katakan dengan perencanaan keuangan. Perencanaan anggaran adalah suatu aktivitas serta satuan menempati posisi penting terhadap definisi segala aktivitas diskualifikasi dalam satuan uang, jadi bisa dihitung pencapaian efisiensi dan efektivitas dari aktivitas yang dilakukan.

Realisasi Anggaran

Dapat disimpulkan bahwa makna realisasi adalah segala aktivitas/proses untuk mencapai yang direncanakan. Dimulai dengan angan-angan sehingga orang bisa memenuhi target yang ingin di gapai pada periode yang telah ditentukan, lalu membuat rencana untuk mencapainya, lalu rencana tersebut direalisasikan dan dilaksanakan dalam bentuk aktivitas nyata. Realisasi anggaran ialah penyajian pendapatan Pemerintah Daerah selama satu periode, pembiayaan, belanja surplus/defisit dan sisa kurang/lebih anggaran. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ialah salah satu bagian dari laporan keuangan pemerintah memaparkan informasi mengenai realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding dalam suatu periode tertentu. Informasi itu bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan tentang alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. (Halim dan Kusufi, 2014: 284)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang isinya memaparkan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya kas yang dikelola oleh pemerintah dalam satu tahun (Siregar, 2015: 82). LRA mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. (Halim dan Kusufi, 2012: 271).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perencanaan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang sudah di setuju oleh DPR. Pasal 64 Ayat (2) Nomor 5 Tahun 1974 berisi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah bisa diartikan menjadi perencanaan operasional keuangan daerah, dimana satu pihak memaparkan analisis pengelolaan setinggi-tingginya untuk pembiayaan proses kegiatan operasional serta proyek-proyek daerah selama satu periode (Halim, 2007:20). Anggaran merupakan alat kebijakan ekonomi, manajemen, dan akuntabilitas. Pertumbuhan dan stabilitas perekonomian merupakan salah satu fungsi dari anggaran beserta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan. Pemandagri No. 13 Tahun 2006, APBD merupakan landasan dalam mengelola keuangan daerah selama satu tahun anggaran dihitung mulai 1 januari sampai 31 Desember.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Halim dan Iqbal (2012:85) mengungkapkan bahwa kebijakan penyusunan anggaran dilandasi struktur dari APBD yang terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
3. Pembiayaan Daerah

Kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Malang

Kinerja ialah gambaran tentang tingkat pencapaian suatu pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi sudah tersaji dalam perencanaan strategis suatu organisasi (Bastian, 2006:274). Kinerja biasanya digunakan sebagai menyebut tingkat keberhasilan atau tingkat kesuksesan kelompok maupun individu. Kriteria kesuksesan ini berupa target atau tujuan yang akan diwujudkan. Tanpa ada target maupun tujuan, kinerja organisasi atau individu tidak akan bisa diketahui karena tidak ada tolak ukurnya

Hasil dari aktivitas maupun program yang sudah maupun akan dilaksanakan berhubungan dalam penggunaan dana daerah terhadap kuantitas dan kualitas yang diukur adalah kinerja keuangan pemerintah daerah, kemampuan pemerintah daerah bisa dihitung dengan menilai efisiensi dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Hendro Sumarjo dalam Tyas Nurulafifah, 2012).

Penelitian Terdahulu

Andre P dan Tressje (2015), dengan penelitian yang berjudul “Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa”. Hasil penelitian APBD Kabupaten Minahasa memperlihatkan jika dalam kurun waktu 3 periode pemerintah Kabupaten Minahasa belum baik untuk merealisasikan pendapatan daerahnya. Berbanding terbalik dengan belanja daerah, dalam kurung 3 periode penelitian Kabupaten Minahasa baik dalam merealisasikan anggaran belanjanya dengan tidak melebihi total anggaran yang telah di rencanakan.

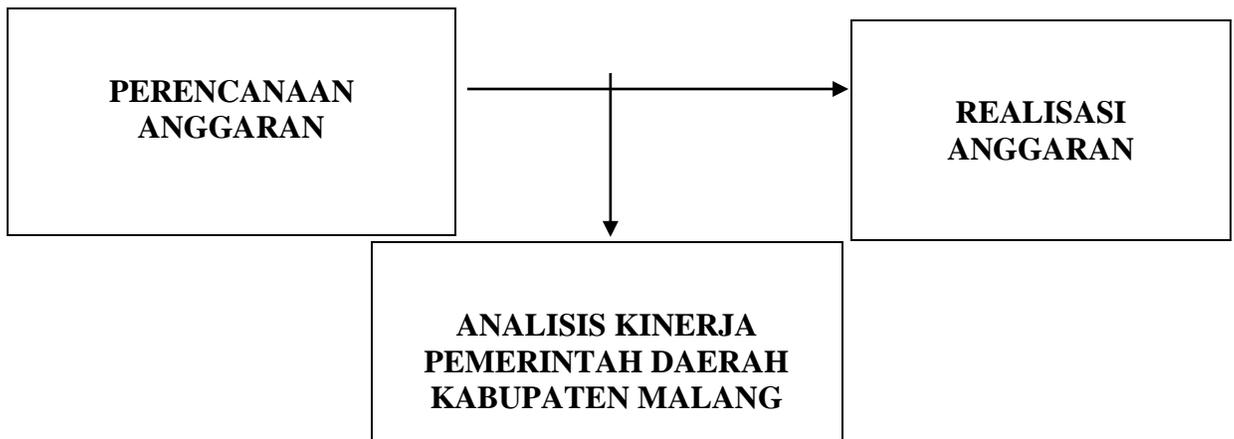
Risca Yunia Lestari (2017) dengan penelitian berjudul “Analisis Target Perencanaan dan Realisasi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Langkat”. Hasil penelitian ini adalah target perencanaan dan realisasi penerimaan Kabupaten Langkat belum sesuai dikarenakan ada perbedaan antara perencanaan dan realisasi penerimaan

Dea Ivana, dkk (2018) dengan penelitian berjudul “Analisis Perencanaan dan Penganggaran untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2015”. Hasil penelitian ini adalah proses perencanaan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam hal ini di tunjang oleh Badan Keuangan Daerah setempat sudah baik. Langkah pertama dalam penyusunan APBD ialah Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang isinya terdapat Persiapan

penyusunan RKPD, Pelaksanaan Musnerbang RKPD, Perumusan Rancangan akhir RKPD, Penetapan RKPD oleh Satuan Kerja Pemerintah daerah (SKPD) di setiap instansi dinilai sudah berjalan dengan baik. Namun ada beberapa tahap yang harus diperhatikan konsistensi supaya tetap berkualitas sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan tinjauan teori diatas dan penelitian terdahulu maka kerangka konseptual dibawah ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Kerangka Konseptual

Berdasarkan Kerangka Konseptual di atas menggambarkan bahwa perencanaan anggaran apakah sesuai dengan realisasi anggaran untuk mengukur kinerja pemerintah daerah Kabupaten Malang dilihat dari segi Laporan Realisasi Anggaran.

METODE PENELITIAN

Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini bertempat Kantor Badan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang yang ber alamat di JL. Agus Salim No. 7, Kiduldalem, Kec. Klojen Kota Malang, Jawa Timur 65119. Waktu Penelitian penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti pada bulan April 2020 sampai dengan selesai.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan suatu objek/subjek yang berada pada wilayah serta memenuhi syarat-syarat tertentu (Riduwan, 2011). Salah satu subyek dari penelitian ini adalah pegawai kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang.

Ghozali (2005) mengungkapkan bahwa sampel merupakan bagian dari populasi mempunyai kriteria tertentu dalam sebuah penelitian. Pengukuran sampel ialah sebuah langkah yang digunakan untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian sebuah objek. Didalam penelitian ini karyawan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BAKD) Kabupaten Malang menjadi sampel.

Definisi Operasional Variabel

1. Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran sangat dibutuhkan untuk sebuah kinerja atau sebuah program kerja dalam satu periode tertentu. Perencanaan anggaran di dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui adakah perencanaan tersebut sesuai dengan realisasi.

2. Realisasi Anggaran

Dalam penelitian ini realisasi anggaran digunakan untuk mengukur seberapa tepat dan seimbang Realisasi Anggaran dengan Perencanaan Anggaran yang telah di buat, bertujuan untuk mengukur apakah rencana anggaran dan realisasi anggaran berjalan dengan baik sebagai bentuk atau mengukur kinerja keuangan APBD Kabupaten Malang.

3 . Analisis APBD Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang

Kinerja ialah gambaran mengenai tingkat kesuksesan atau kebijaksanaan didalam mewujudkan tujuan, visi, misi, dan sasaran instansi yang tersaji dalam perumusan skema strategis sebuah organisasi (Bastian, 2001:329). Analisis kinerja pemerintah ialah suatu tolak ukur dari segi Laporan Realisasi Anggaran didapatkan peneliti dari Badan Keuangan dan Aset Daerah. Cara yang diperlukan untuk mengetahui analisis kinerja perencanaan anggaran dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dihitung dengan analisis sebagai berikut:

a. Analisis Pendapatan

Analisis pendapatan dapat diketahui hasilnya dengan cara seperti berikut:

A. Analisis varians Pendapatan = Realisasi Pendapatan – Anggaran

B. Rasio Analisis Derajat Desentralisasi

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

C. Rasio Efektivitas Daerah

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

. Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat di kelompokkan sebagai berikut:

- a) a. Sangat Efektif : >100%
- b) b. Efektif : 100%

- c) c. Cukup Efektif : 90-99%
- d) d. Kurang Efektif : 75-89%
- e) e. Tidak Efektif : <75%

Sumber: Mahmudi (2013:141)

b. Analisis Belanja

Selisih anggaran belanja dikategorikan 2 macam, yaitu:

- Selisih disukai (*Favourable variance*) ialah realisasi belanja lebih kecil dari yang di anggarkan atau
- Selisih tidak disukai (*Unfavourable variance*) ialah realisasi belanjanya lebih besar dari yang telah di anggarkan

Berikut adalah cara untuk menghitung analisis belanja Pemerintah Kabupaten Malang:

A. Analisis Varians Belanja = Realisasi Belanja - Anggaran

B. Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

- $Rasio\ Belanja\ Modal\ terhadap\ Total\ Belanja = \frac{Realisasi\ Belanja\ Modal}{Total\ Belanja\ Daerah} \times 100\%$
- $Rasio\ Belanja\ langsung\ terhadap\ Total\ Belanja = \frac{Total\ Belanja\ Langsung}{Total\ Belanja\ Daerah} \times 100\%$
- $Rasio\ belanja\ tidak\ langsung\ terhadap\ Total\ Belanja = \frac{Total\ Belanja\ tidak\ Langsung}{Total\ Belanja\ daerah} \times 100\%$

C. Analisis Rasio Efisien Belanja

- $Rasio\ Efisien\ Belanja = \frac{Realisasi\ Belanja}{Anggaran\ Belanja} \times 100\%$

Pemerintah Daerah bisa dikatakan sudah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%. Namun, sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasi terjadinya pemborosan anggaran

Metode Analisis data

Metode analisis yang digunakan untuk membahas fenomena terhadap penelitian ini menggunakan analisis deskriptif di dasarkan terhadap Laporan Keuangan Anggaran (LRA) yaitu melalui konsep anggaran khususnya analisis perencanaan anggaran dan realisasi anggaran. Analisis deskriptif ialah aktivitas yang menyusun, mengklasifikasikan, menafsirkan, dan menyimpulkan data sehingga memberikan sebuah gambaran mengenai masalah yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pendapatan

1. Analisis Selisih Pendapatan = Realisasi Pendapatan - Anggaran

Tabel 1

Analisis Selisih Pendapatan Kabupaten Malang Tahun 2016-2018

Tahun	Keterangan		Varians Pendapatan	%
	Realisasi	Anggaran		
2016	3.439.632.063.348	3.448.451.881.578	- 8.819.818.230	99,7
2017	3.741.811.706.499	3.700.432.137.974	41.568.568.525	101,11
2018	3.800.114.750.714	3.824.390.785.364	-24.276.034.650	99,3

Sumber : BKAD Kabupaten Malang

Analisis Selisih Pendapatan memperlihatkan bahwa kinerja keuangan pendapatan daerah Kabupaten Malang kurun waktu 3 tahun dari tahun 2016-2018 dapat dikatakan belum baik dalam menjalankan kinerja pendapatan.

2. Analisis Rasio Derajat Desentralisasi

Tabel 2

Derajat Desentralisasi Kabupaten Malang Tahun 2016-2018

Tahun	Keterangan		%
	PAD	Total Pendapatan	
2016	502.754.981.974	3.439.632.063.348	14,6
2017	743.313.499.675	3.741.811.706.499	19,8
2018	585.290.988.835	3.824.390.785.364	15,3

Sumber : BAKD Kabupaten Malang

Dari Tabel 2 bisa diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Malang belum bisa memperlihatkan kemampuan dalam menyelenggarakan derajat desentralisasi terlihat dari 3 tahun masih dibawah 50%.

3. Rasio Efektivitas Pajak

Tabel 3
 Rasio Efektivitas Pajak Kabupaten Malang Tahun 2016-2018

Tahun	Keterangan		%
	Realisasi Penerimaan Pajak	Target Penerimaan Pajak	
2016	191.399.578.172	156.960.000.000	121,9
2017	255.851.109.883	188.360.000.000	135,8
2018	281.124.088.274	236.733.761.500	118,7

Sumber : BAKD Kabupaten Malang

Berdasarkan Tabel 3 memperlihatkan bahwa Rasio Efektivitas Pajak dinyatakan baik apabila melebihi rasio ini lebih dari 100%. Tahun 2016 Rasio Efektivitas Pajak memperlihatkan 121,9% .

4. Analisis Belanja

1. Analisis Varians Belanja

Tabel 4
 Analisis Varians Anggaran Belanja Kabupaten Malang Tahun 2016-2018

Tahun	Keterangan			%
	Realisasi	Anggaran	Varians Belanja	
2016	3.543.281.420.693	3.769.545.761.843	- 226.264.341.150	93,9
2017	3.617.054.713.494	3.867.867.660.896	- 70.812.974.402	93,5
2018	3.648.517.932.310	4.050.668.474.662	- 402.150.542.352g	90

Sumber: BKAD Kabupaten Malang

Menurut perhitungan Tabel 4 memberi informasi mengenai perbandingan selisih antara realisasi belanja dengan anggaran.

2. Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

a. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Analisis belanja operasi terhadap total belanja adalah perbandingan dari total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah.

Tabel 5

Belanja Modal terhadap Total Belanja Kabupaten Malang Tahun 2016-2018

Tahun	Keterangan		%
	Realisasi Belanja Modal	Total Belanja Daerah	
2016	683.925.121.301	3.543.281.420.693	19,3
2017	740.344.342.423	3.617.054.713.494	19,1
2018	718.608.045.403	3.648.517.932.310	17,7

Sumber : BKAD Kabupaten Malang

Dilihat dari tabel 5 kinerja keuangan Belanja daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2018 secara umum alokasi dananya di alokasikan untuk belanja modal. Hal ini bisa diketahui dari rata-rata pertahun selama 3 tahun ini.

b. Rasio Belanja Langsung dan tidak langsung terhadap total belanja

Tabel 6

Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Kab. Malang Tahun 2016-2018

Tahun	Keterangan		%
	Total Belanja Langsung	Total Belanja Daerah	
2016	1.531.728.557.651	3.543.281.420.693	43,2
2017	1.708.407.159.181	3.617.054.713.494	47,2
2018	1.734.446.511.180	3.648.517.932.310	47,5

Sumber : BKAD Kabupaten Malang

Dari tabel 6 dapat disimpulkan bahwa selama 3 tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 Rasio belanja langsung mengalami peningkatan

c. Rasio Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja

Tabel 7

Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja Kabupaten Malang 2016-2018

Tahun	Keterangan		%
	Total Belanja Tidak Langsung	Total Belanja Daerah	
2016	2.011.552.863.042	3.543.281.420.693	56,7
2017	1.908.647.554.313	3.617.054.713.494	52,7
2018	1.914.273.199.209	3.648.517.932.310	52,4

Sumber : BKAD Kabupaten Malang

Dilihat dari tabel 7 diatas selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 Total Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Malang mengalami peningkatan dibandingkan dengan Rasio Belanja Langsung dana yang di alokasikan lebih sedikit dibanding dengan Rasio Belanja Langsung.

5. Analisis Rasio Efisiensi Belanja

Tabel 8

Efisiensi Belanja Kabupaten Malang Tahun 2016-2018

Tahun	Keterangan		%
	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	
2016	3.543.281.420.693	3.769.545.761.843	94
2017	3.617.054.713.494	3.867.867.660.896	93,5
2018	3.648.517.932.310	4.050.668.474.662	90

Sumber : BKAD Kabupaten Malang

Berdasarkan Tabel 8 diatas memperlihatkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Malang sudah efisien dalam menggunakan anggaran untuk belanja daerah. Rasio ini dibawah 100% maka bisa dikatakan ini efisien dan tidak terjadi indikasi pemborosan anggaran belanja di Pemerintah Kabupaten Malang

Pembahasan

Analisis Kinerja APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Malang

A. Analisis Pendapatan

1. Analisis Varians (Selisih) Pendapatan

Penelitian ini selama 3 tahun yang sebagian besar mengalami selisih kurang dan hanya pada tahun 2017 mengalami selisih lebih sebesar Rp 41.568.568.525. Realisasi pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang belum bisa dikatakan baik karena adanya beberapa unsur pendapatan yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Analisis Rasio Derajat Desentralisasi

Pemerintah daerah dikatakan sudah mampu menyelenggarakan desentralisasi jika hasil persentase diatas 50% (Kementrian keuangan : 2011). Realisasi tingkat derajat desentralisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Malang selama tahun 2016-2018 dikatakan belum memperlihatkan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam menyelenggarakan desentralisasi karena masih pada dibawah persentase 50%.

3. Analisis Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Dalam 3 tahun terakhir sudah memperlihatkan persentase 100%. dapat disimpulkan bahwa rasio efektivitas pajak daerah Kabupaten Malang pada tahun 2016-2018 dikatakan efektif baik dan masih labil dalam mengumpulkan pajak daerah, karena memperlihatkan persentase lebih 100%. Hal ini merupakan indikasi yang baik dalam pencapaian penerimaan pajak daerah.

B. Analisis Belanja

1. Analisis Varians Belanja

Berdasarkan data yang sudah di olah peneliti, Pada tahun 2016-2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tidak terindikasi pemborosan belanja anggaran karena persentase tidak melebihi 100%. Analisis Varians Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang bisa dikatakan relatif baik dalam mendistribusikan anggaran belanjanya.

2. Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

a. Rasio Belanja Modal Terhadap Total belanja

Dalam analisis ini, pembaca laporan bisa melihat porsi belanja daerah yang didistribusikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran yang bersangkutan. Berbanding terbalik dengan belanja barang dan jasa yang bersifat jangka pendek dan rutin, pengeluaran belanja modal

dilaksanakan saat ini akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang.

b. Rasio Belanja Langsung Terhadap Total Belanja

Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dapat disimpulkan bahwa selama 3 tahun terakhir dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 Rasio belanja langsung mengalami peningkatan.

c. Rasio Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja

Selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 Total Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Malang mengalami pendistribusian anggaran total belanja daerah lebih besar daripada belanja langsung.

3. Analisis Rasio Efisiensi Belanja

Kabupaten Malang telah melakukan efisiensi belanja untuk tahun 2016-2018 dapat dilihat dari perhitungan Analisis Efisiensi Belanja Pemerintah Kabupaten Malang persentase dibawah 100% dan tidak terjadi pemborosan anggaran..

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara umum bisa dikatakan relatif baik, meskipun ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih tinggi dan pemungutan pajak daerah masih belum efisien. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian terdahulu Andre P dan Tresje (2015) dengan penelitian berjudul “Analisis Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa” bahwa realisasi pendapatan dikatakan relatif baik, namun dalam hal belanja sudah dikatakan baik.

Keterbatasan

Penelitian ini hanya pada 3 tahun yaitu tahun 2016 sampai 2018, dan hanya satu daerah yang diteliti.

Saran

Diharapkan penelitian berikutnya menambah periode tahun penelitian agar lebih akurat dalam menganalisis Kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Malang.

DAFTAR PUSTAKA

Addina, Mazzira. 2009. *Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan*. Fakultas Ekonomi. Universitas Sumatera Utara.

- Andre, P., & Treesje., 2015. *Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Jurusan Akuntansi Univeritas Sam Ratulangi Manado.
- Dealice, ivana., dkk. 2018. *Analisis Perencanaan dan Penggaran untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2015*. Universitas Sam Ratulangi.
- <https://malangvoice.com/kpk-lanjutkan-pemeriksaan-11-saksi-kasus-bupati-malang-di-polres-makot>
- Lilis, Marlina., 2015. *Efek Ratcheting Dalam Anggaran Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh*. Universitas Teuku Umar
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta. UPP STIM YKPN
- Meita, Sawang., & Yayuk, 2015. *Analisa Anggaran dan Realisasi dengan Metode Varians Terhadap Laporan Laba Rugi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor
- Neco Fransiska, DKK. 2016. *Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Fakultas ekonomi Slamet Riyadi Surakarta.
- Novtania Mokoginta, Dkk. 2017. *Pengaruh sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.
- Risca Yunia Lestari. (2017). *Analisis Target Perencanaan dan Realisasi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Langkap*. UIN Sumatera Utara.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan Ke-23, Alfabeta, Bandung.
- *) Wilis Auliana adalah Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
- **) Moh. Amin adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.
- ***) Siti Aminah Anwar adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.